

PEMBINAAN PEREMPUAN KADER PARTAI OLEH PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA

Al Rafni

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka Padang 25171

e-mail: alrafni68@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterwakilan perempuan dalam jabatan-jabatan politik maupun pemerintahan. Partai politik merupakan salah satu institusi demokrasi yang paling strategis dalam menyiapkan kadernya untuk berkiprah di dunia politik. Sayangnya pembinaan yang dilakukan oleh partai terhadap kader perempuannya belum dapat meningkatkan peran perempuan dalam politik, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Temuan penelitian menunjukkan belum tersistematisnya strategi, materi, maupun metode pembinaan yang diberikan terhadap perempuan. Hal ini tentu berimplikasi terhadap proses pembangunan politik di Indonesia terutama untuk akses dan kesempatan dalam menempati posisi-posisi penting dalam politik.

Kata kunci: pembinaan, perempuan, kader partai dan pembangunan politik

1. Pendahuluan

Salah satu tolok ukur untuk melihat terjadinya pembangunan politik menurut Lucian W. Pye dalam Afan Gaffar (1989) adalah menyangkut ada tidaknya the spirit or attitude toward equality dari para penyelenggara negara dan warga masyarakat. Artinya, sikap atau semangat terhadap persamaan atau ekualitas. Persamaan ini mencakup kesempatan yang sama kepada seluruh warga masyarakat untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik, untuk direkrut menempati posisi-posisi penting dalam politik dan pemerintahan. Salah satu institusi demokrasi yang sangat strategis dalam melakukan pembinaan terhadap perempuan kader partainya yaitu partai politik. Partai politik berperan penting membina perempuan kader partainya untuk disiapkan menjadi kader yang berkualitas dan sekaligus mendongkrak keterwakilan perempuan di politik khususnya di lembaga legislatif. Mengapa diperlukan keterwakilan politik perempuan? Menurut Valina Singka Subekti (2008) ada beberapa argumen yang dapat dikemukakan. Pertama, terkait dengan hak-hak politik perempuan yang merupakan bagian integral yang tak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Kedua, dalam sistem demokrasi pandangan dari kelompok-kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam formulasi kebijakan strategis. Ketiga, terkait dengan masalah kuantitas bahwa perempuan adalah bagian terbesar dari penduduk Indonesia (lebih dari 50%). Keempat, terkait dengan persoalan kompleks yang dihadapi Indonesia di era transisi ini termasuk masalah ekonomi, lapangan kerja, kemiskinan dan integrasi bangsa. Dalam konteks ini perempuan adalah bagian terbesar dari mereka yang kurang beruntung, sehingga mereka tetap berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

Oleh karena itu peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik secara kuantitas maupun kualitas merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan untuk sama-sama berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam sistem demokrasi

pandangan dari kelompok-kelompok harus dipertimbangkan dalam formulasi kebijakan strategis (International IDEA, 2002).

Lebih lanjut menurut Ani Soetjipto (2005) ada enam cara yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk memajukan peran perempuan yaitu : (1) gender sensitivity training (pelatihan kepekaan gender) yang didasarkan pada pendidikan politik. Hal ini digunakan untuk mengubah opini dan pandangan masyarakat tentang politik dan juga merupakan proses pemberdayaan bagi perempuan untuk mengetahui hak-hak yang dimilikinya dan bagaimana cara penggunaan hak tersebut ; (2) strategi untuk membawa suara perempuan masuk ke dalam sebuah organisasi atau partai politik ; (3) lobbying (kegiatan lobi), kampanye dan advokasi serta kerjasama dengan LSM dan pemerintah ; (4) aktivitas partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan ; (5) identifikasi dan dukungan bagi perempuan ; dan (6) perlunya kuota agar terjadinya keseimbangan dan untuk mencapai critical mass (angka strategis).

Pembinaan yang dilakukan oleh partai politik pada perempuan kader partai dilaksanakan melalui proses kaderisasi. Kaderisasi merupakan proses penyiapan sumberdaya manusia agar kelak menjadi pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih baik. Menurut Koirudin (2004) strategi pembinaan terhadap kader partai mengandung dua persoalan yaitu : Pertama, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan partai untuk meningkatkan kemampuan kader baik berupa pengetahuan maupun keterampilan (skill). Kedua, bagaimana upaya yang dilakukan oleh partai untuk membentuk dan mempersiapkan tenaga-tenaga potensial, militan, penuh dedikasi dan mampu menjaga kelestarian visi dan misi partai. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengkajian tentang bagaimana bentuk pembinaan perempuan kader partai melalui partai politik dalam perspektif pembangunan politik di Indonesia.

2. Pembahasan

Upaya pembinaan perempuan kader partai oleh partai politik merupakan peningkatan/penguatan peran perempuan dalam pembangunan politik. Di Indonesia, upaya menuju kesetaraan gender di bidang politik telah menjadi pembahasan yang serius mulai dari *Jakarta Plan of Action for the Advancement of Women in Asia and the Pacific*, Juni 1994 di Jakarta dan Konferensi PBB IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Terakhir menjadi salah satu target pencapaian *Millenium Development Goals (MDGs)* tahun 2015, dimana tujuannya adalah meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di segala bidang termasuk bidang politik. Kemudian di ranah nasional telah tersedia seperangkat regulasi yang menjamin kesetaraan gender dalam representasi yaitu : (1) UUD 1945 pasal 28 h ayat 2 tentang perlakuan khusus terhadap kelompok marjinal ; (2) UU No.68 tahun 1958 menyatakan akan jaminan persamaan hak politik antara perempuan dan laki-laki ; (3) UU No.7 tahun 1984 yang meratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ; (4) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan ; (5) Tap MPR RI No.VI/2002 yang merekomendasikan pada Presiden untuk kuota 30% bagi perempuan di lembaga pengambilan keputusan ; (6) rekomendasi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB agar negara-negara anggota PBB dapat memenuhi target 30% perempuan untuk duduk dalam lembaga pengambilan keputusan hingga tahun 2000. Bahkan sekarang telah diperbaharui menjadi sebesar 50%, lima tahun setelah Konferensi Beijing ; (7) UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilu pasal 65 ayat 1 ; (8) UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang pada pasal 20 menegaskan keharusan menyertakan 30%

kepengurusan perempuan dalam pendirian partai politik ; dan (9) UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu 2009, dimana pada pasal 53 mengakomodir kuota 30% dalam pencalonan anggota legislatif perempuan. Tetapi berbagai peraturan ini akan menjadi barang yang mati kalau tidak ditunjang oleh aksi kongkrit menuju pemberdayaan perempuan di bidang politik.

Model pembinaan partai politik baik dari segi strategi pembinaan, materi pembinaan, maupun metode pembinaan hendaknya dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan perempuan. Squires 2000) dalam bukunya *Gender in Political Theory* menyebutkan diperlukannya perlakuan khusus bagi perempuan. Ia juga mengungkapkan bahwa perempuan menempati posisi yang berbeda dalam masyarakat, pengalaman yang berbeda untuk memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan spesifik (khusus) perempuan, maka akan lebih baik diwakili oleh perempuan. Strategi yang jelas dari partai serta komitmen partai memberikan afirmatif terhadap kader perempuan tentu akan menjadi hal yang krusial dalam meningkatkan kualitas keterwakilan perempuan. Disamping itu materi pembinaan untuk kader perempuan hendaknya relevan dengan tugas-tugasnya di dalam keanggotaan badan legislatif ataupun jabatan-jabatan politik lainnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pembinaan perempuan kader partai dengan laki-laki kader partai tidak dibedakan. Strategi pembinaan dilakukan secara reguler dan insidental. Tidak sistematisnya program-program pembinaan membuat peningkatan kapasitas terkesan hanya formalitas. Sementara materi pembinaan yang diberikan partai diarahkan kepada militansi kader terhadap partai.

Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa materi-materi yang responsif gender tidak begitu menjadi perhatian dari struktur partai. Kemudian dari segi metode, masih ditemui metode yang konvensional seperti sosialisasi dan tanya jawab.

Lebih lanjut Lili Djenaan (2011) menjelaskan salah satu metode yang direkomendasikan untuk peningkatan kapasitas perempuan yaitu melalui metode pendidikan kesadaran kritis. Metode yang dilakukan dengan peningkatan kesadaran kritis hendaknya tidak terlepas dari rambu-rambu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu :

- (1) punya tujuan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai
- (2) punya cara yang tepat untuk mencapai tujuan
- (3) pemantauan terhadap hasil yang diperoleh
- (4) dukungan data yang cukup valid
- (5) memanfaatkan media semaksimal mungkin
- (6) kesadaran bahwa apa yang dilakukan merupakan sebuah kerjasama (semua pihak memiliki peran yang sangat tinggi)
- (7) adanya kesinambungan antara program yang satu dengan yang lain
- (8) pendidikan kritis tetap jalan kapan dan dimanapun, dan dalam bentuk apapun
- (9) membangun solidaritas gerakan.

Bila ditelaah lebih lanjut pengembangan model pembinaan yang dimaksudkan tentu bertujuan untuk meningkatkan pembinaan yang telah ada, baik dari segi strategi, materi dan metode.

2.1. Strategi Pembinaan.

Pengembangan model pembinaan perempuan kader partai dari segi strategi pembinaan adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Partai harus menciptakan pola pembinaan kader yang terprogram, terukur, sistematis, dan komprehensif serta berlaku di semua lini kader dan wilayah kader.
- 2) Adanya tata norma, aturan dan tata institusi dalam membentuk sistem pengkaderan, baik pengkaderan umum dan pengkaderan khusus.
- 3) Partai harus menerapkan model rekrutmen yang terbuka dan demokratis.
- 4) Membangun institusi pengkaderan yang mandiri di dalam partai dan institusi independen yang membina para caleg lintas partai.
- 5) Terdapatnya sistem evaluasi pembinaan kader yang berkesinambungan.
- 6) Membentuk jaringan kerja kader melalui interaksi antar kader demi meningkatkan kualitas kader agar lahir kader-kader yang loyal dan berdedikasi tinggi.
- 7) Perlu dilakukan *affirmative action* dalam merekrut dan melakukan pola pembinaan perempuan kader partai guna mencapai *critical mass* (angka strategis).
- 8) Model pembinaan perempuan kader partai, baik dari segi strategi pembinaan, materi pembinaan maupun metode pembinaan hendaknya dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan perempuan.

2.2. Materi Pembinaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa materi pembinaan kader tidak dibedakan antara kader partai perempuan dan kader laki-laki. Dari struktur dalam partai materi pembinaan diarahkan kepada tiga hal utama yaitu :

- (1) Materi-materi yang berhubungan dan bertujuan menanamkan pemahaman dan militansi sebagai anggota partai politik ;
- (2) Materi-materi yang menyangkut pemahaman dan militansi sebagai warganegara Republik Indonesia ; dan
- (3) Materi-materi yang berkaitan dengan upaya-upaya kader dan partai dalam memenangkan pemilu.

Sementara itu dari luar struktur partai, temuan penelitian menunjukkan terdapatnya banyak materi-materi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader perempuan dari partai politik. Adapun pengembangan materi pembinaan perempuan kader partai dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Materi-materi yang berhubungan dengan penciptaan kader militansi partai.
- 2) Materi-materi yang berhubungan dengan masalah kebangsaan dan nasionalisme.
- 3) Materi-materi yang berhubungan dengan komunikasi politik dan *public hearing*.
- 4) Materi-materi yang berhubungan dengan persiapan kader perempuan memenangkan pemilu.
- 5) Materi-materi seputar teknis penyelenggaraan pemilu.
- 6) Materi-materi yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran responsif gender.
- 7) Materi-materi yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi legislasi seperti teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*), dan sebagainya.
- 8) Materi-materi yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.
- 9) Materi-materi yang berhubungan dengan fungsi perwakilan.
- 10) Materi-materi yang berhubungan dengan etika politik dan etika pemerintahan.

2.3. Metode Pembinaan.

Metode pembinaan yang digunakan partai dalam melakukan proses kaderisasi pada saat ini adalah metode ceramah, *brainstorming* (curah pendapat), diskusi dan tanya jawab. Metode ini perlu dikembangkan ke arah yang lebih dinamis. Berikut ini terdapat beberapa metode pembinaan yang dipandang cukup efektif untuk melakukan pembinaan terhadap perempuan kader partai. Metode tersebut adalah :

- (1) metode kesadaran kritis
- (2) metode advokasi
- (3) metode evaluasi
- (4) metode sosialisasi
- (5) metode fasilitasi
- (6) metode seminar
- (7) metode workshop
- (8) metode pendidikan politik
- (9) metode dialog interaktif
- (10) metode forum koordinasi
- (11) metode *brainstorming*
- (12) metode jejaring/kemitraan.

3. Kesimpulan dan Saran

Pembangunan politik pada hakekatnya adalah pergerakan menuju demokrasi. Oleh sebab itu dalam proses tahapan pembangunan politik itu sendiri harus terjamin adanya kesetaraan gender dalam politik. Salah satu upaya menuju ke arah itu melakukan pembinaan terhadap perempuan kader partai agar mereka lebih siap berkiprah di peran-peran politik dan pemerintahan. Partai berkewajiban menyelenggarakan proses pembinaan/kaderisasi dengan kurikulum yang jelas, strategi yang tepat dan metode yang inovatif agar terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik.

Untuk itu disarankan beberapa hal :

- (1) Pemerintah memberikan dana yang cukup untuk program-program kaderisasi partai
- (2) Perlu merencanakan program-program kaderisasi yang sesuai dengan kebutuhan perempuan ; dan
- (3) Perempuan harus bersedia memotivasi dirinya untuk berkiprah di domain politik.

Daftar Pustaka

- Afan Gaffar. (1989). *Beberapa Aspek Pembangunan Politik*. Jakarta : Rajawali Press.
- Ani Soetjipto. (2000). *Hak Politik Wanita Indonesia dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung : Alumni.
- International IDEA. (2002). *Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah*. Jakarta : International IDEA.
- Koirudin. (2004). *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Lily Djenaan. (2011). "Strategi Penguatan Responsibilitas Perempuan (Belajar Merajut Bersama)". Makalah disampaikan Seminar Penguatan Peran Perempuan dalam Politik dan Masyarakat, diselenggarakan oleh Konrad Adenauer Stiftung (KAS)

bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia Cabang Sumatera Barat, 30 Juni – 1 Juli 2011, di Padang.

Squires, Judith. (2000). *Gender in Political Theory*. Cambridge : Polity Press.

Valina Singka Subekti. “Kepemimpinan Politik di Indonesia” dalam *Jurnal Politika* Vol.4 No.1 Tahun 2008. Jakarta : Akbar Tanjung Institute.